



BANK TJANDRA ARTHA

PT BPR Tjandra Artha Lestari

Nomor : 027/BPR-TJA/DIR/III/2025

Lampiran :-

Kepada YTH.

-Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provisi Lampung

-Pimpinan PERBARINDO

-Pimpinan Majalah Media BPR

di Tempat

Perihal : Penyampaian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2024

Dengan hormat,

Bersama ini, kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2024.

Demikianlah surat ini dibuat, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 26 Maret 2025

Hormat kami,


Susan Riana

Direktur Utama

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR TJANDRA ARTHA LESTARI
TAHUN 2024**



TJANDRA ARTHA

PT BPR Tjandra Artha Lestari

ARTHA BENEK YANG AMAN DAN TERPERAYA

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
BAB I.....	2
BAB II.....	3
A. Ringkasan Hasil Penilaian (<i>Self Assessment</i>) atas Penerapan Tata Kelola.....	3
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.....	4
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.....	5
4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	6
5. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	6
6. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	6
7. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	7
8. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan berdasarkan RUPS.....	7
9. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	8
10. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun.....	8
11. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	9
12. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>).....	9
13. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi.....	9
14. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	9
15. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain.....	10

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat dan Bank Perkonomian Rakyat Syariah, Tata Kelola yang baik pada BPR dan BPR Syariah adalah struktur, proses dan mekanisme pengelolaan BPR dan BPR Syariah yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada

BPR dan BPR Syariah secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip dan praktik yang berlaku umum.

BPR dan BPR Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik pada BPR dan BPR Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Hal ini lah yang menjadi dasar dalam penerapan Tata Kelola di BPR Tjandra Artha Lestari.

Penerapan Tata Kelola di PT. BPR Tjandra Artha Lestari diwujudkan dalam :

- Aspek pemegang saham
- Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi
- Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
- Penangan benturan kepentingan
- Penerapan fungsi kepatuhan
- Penerapan fungsi audit intern
- Penerapan fungsi audit ekstern
- Penerapan Manajemen Resiko dan strategi *anti-fraud*, termasuk sistem pengendalian intern
- Batas maksimum pemberian kredit BPR
- Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
- Rencana bisnis BPR

Berikut kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2024.

BAB II

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assesstment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat : Jl. Patimura No. 49 D, Kupang Kota, Teluk Betung Utara - Bandar Lampung	
No Telepon : (0721) 487111	
Penjelasan Umum : Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPR Tjandra Artha Lestari sepanjang tahun 2024 berusaha menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat dan Bank Perkonomian Rakyat Syariah. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR ini disusun untuk memberi gambaran tentang BPR Tjandra Artha Lestari, melindungi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan menjalankan kewajiban yang disyaratkan dalam POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat dan Bank Perkonomian Rakyat Syariah.	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assesstment</i>) Tata Kelola PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2024 : 2 (BAIK)	
artinya : Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan Tata Kelola yang secara umum BAIK. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.	
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assesstment</i>) Tata Kelola : BPR Tjandra Artha Lestari sepanjang tahun 2024 telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam seluruh aktivitas kegiatannya. Masih terdapat beberapa kelemahan seperti : - Anggota Direksi hanya satu (1) dan belum ada anggota Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan. - Salah satu anggota Dewan Komisaris belum memiliki Sertifikasi. Tetapi kelemahan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi BPR Tjandra Artha Lestari. BPR Tjandra Artha Lestari akan terus berupaya menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan sehat, berkelanjutan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang berlandaskan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang undangan yang berlaku.	

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	NIK	:	1871125010710011
	Nama	:	Susan Riina
	Jabatan	:	Direktur Utama
2.	NIK	:	-
	Nama	:	-
	Jabatan	:	Direktur
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :			
(1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR dan			

	BPR Syariah untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah sesuai dengan maksud dan tujuan BPR dan BPR Syariah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. (2) Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. (3) Direksi berwenang mewakili BPR dan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. (4) Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris : - NIHIL	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	NIK	:	1671051504640002
	Nama	:	Sutarjo
	Jabatan	:	Komisaris Utama
2.	NIK	:	1871050104510003
	Nama	:	Alesius Bunawan
	Jabatan	:	Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris :			
(1) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR dan BPR Syariah. (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah, kecuali terkait dengan: - penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan - hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR dan BPR Syariah. (5) Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. (6) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap: - pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah; dan - penempatan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.			

Rekomendasi kepada Direksi :
- NIHIL

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit : <i>BPR Tjandra Artha Lestari tidak diwajibkan membentuk KOMITE</i> Tugas dan tanggung jawab : NIHIL Program Kerja : NIHIL Realisasi : NIHIL Jumlah Rapat : NIHIL
2.	Komite Pemantau Resiko : <i>BPR Tjandra Artha Lestari tidak diwajibkan membentuk KOMITE</i> Tugas dan tanggung jawab : NIHIL Program Kerja : NIHIL Realisasi : NIHIL Jumlah Rapat : NIHIL
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi : <i>BPR Tjandra Artha Lestari tidak diwajibkan membentuk KOMITE</i> Tugas dan tanggung jawab : NIHIL Program Kerja : NIHIL Realisasi : NIHIL Jumlah Rapat : NIHIL
4.	Komite Manajemen Resiko : <i>BPR Tjandra Artha Lestari tidak diwajibkan membentuk KOMITE</i> Tugas dan tanggung jawab : NIHIL Program Kerja : NIHIL Realisasi : NIHIL Jumlah Rapat : NIHIL
5.	Komite Lainnya : <i>BPR Tjandra Artha Lestari tidak diwajibkan membentuk KOMITE</i> Tugas dan tanggung jawab : NIHIL Program Kerja : NIHIL Realisasi : NIHIL Jumlah Rapat : NIHIL

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Resiko	Remunerasi & Nominasi	Manajemen Resiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Nominal Tahun Sebelumnya (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)
1.	1871125010710011	Susan Riana	Rp 0	Rp 0	0 %

b. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp.)	Nominal Tahun Sebelumnya (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)
1.	1671051504640002	Sutarjo	Rp. 0	Rp. 0	0%
2.	1871050104510003	Alesius Bunawan	Rp. 4.034.000.000,00	Rp. 4.034.000.000,00	57.63 %

5. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

i. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
1.	1871125010710011	Susan Riana	-	-	0%

ii. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
1.	1671051504640002	Sutarjo	-	-	-
2.	1871050104510003	Alesius Bunawan	-	PT. Cahaya Mitra Sarana	32.50 %
				PT. Sekawan Chandra Abadi	16.67 %
				PT. Sekawan Chandra Persada	20 %

6. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

a. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	1871125010710011	Susan Riana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

b. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	1671051504640002	Sutarjo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	1871050104510003	Alesius Bunawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

7. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

a. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	1871125010710011	Susan Riana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

b. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	1671051504640002	Sutarjo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	1871050104510003	Alesius Bunawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

8. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	258.072.444	2	207.600.000
2	Tunjangan*	1	21.186.687	2	10.604.062
3	Tantiem	0	-	0	-
4	Kompensasi berbasis saham	0	-	0	-
5	Remunerasi lainnya	0	-	0	-
Total Remunerasi		1	279.259.131	2	218.204.062
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan**	0	-	1	20.000.000
2	Transportasi***	0	-	1	12.000.000
3	Asuransi Kesehatan	0	-	0	-
4	Fasilitas lainnya****	0	-	1	2.400.000
Total Fasilitas Lain		0	-	1	34.400.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1	279.259.131	2	252.604.062

*) Tunjangan adalah pph 21 yang ditanggung perusahaan (Direksi dan Dewan Komisaris).

**) Perumahan adalah tunjangan kos tiap bulan untuk Komisaris Utama.

***) Transportasi adalah tunjangan travel dan makan di perjalanan pulang pergi Lampung - Palembang (Komisaris Utama).

****) Fasilitas lainnya adalah tunjangan laundry (Komisaris Utama) tiap bulan.

9. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam perbandingan

Kejelasan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,80 : 1
Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Direksi yang terendah (b)	0
Rasio gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2,66 : 1
Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,34 : 1
Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3 : 1

10. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	24 Juni 2024	2	- Mengarahkan Direktur untuk menindaklanjuti hasil-hasil realisasi pencapaian terhadap Rencana Bisnis Bank bulan Mei 2024. - Usaha menguatkan realisasi bisnis ke depan. - NPL dan upaya penyelesaiannya. - AYDA dan usaha penyelesaian a.n Andi Sam dan Noviro Isni Pahlawan.
2.	2 Juli 2024	2	Mengarahkan Direktur untuk menindaklanjuti Permohonan Eksekusi No. 37/Pdt.Eks.PTS/2017/PN.Tjk.
3.	26 Agustus 2024	2	- Persiapan implementasi Standar Akutansi Keuangan Entitas Privat (SAKEP). - Rencana persiapan dan anggaran biaya yang mungkin timbul terkait dengan Core Banking System (CBS). - Sepakat BPR mengalokasikan dana untuk Core Banking System (CBS) baru agar dapat menyesuaikan dengan aturan SAKEP yang akan berjalan Januari 2025.
4.	30 Oktober 2024	2	- Sepakat menyusun RBB tahun 2025-2027 Strategi peningkatan kuantitas dan kualitas penyaluran kredit di segmen UMKM. - Memperluas jangkauan sumber dana (low cost of fund) dan penyaluran kredit pembiayaan yang semakin inklusif. - Tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian Tata Kelola dan praktek Manajemen Resiko yang baik.

11. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	1671051504640002	Sutarjo	4	-	100
2	1871050104510003	Alesius Bunawan	4	-	100

12. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

14. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rp)	Ket
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial / Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
	-	-	-	-	-	-

Bandar Lampung, 26 Maret 2025

Menyetujui,


Susan Riana
 Direktur Utama




Sutarto
 Komisaris Utama



BANK TJANDRA ARTHA

PT BPR Tjandra Artha Lestari

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGAN
LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola
PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2024**

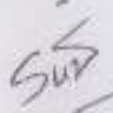
Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi gambaran umum Penerapan Tata Kelola di PT. BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2024. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Bandar Lampung, 26 Maret 2025

Menyetujui,


Susan Riana
Direktur Utama




Sutarjo
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Tjandra Artha Lestari

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933187-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-600046-22042025164616

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

tjandra_lestari@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-04-22 16:46:16



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.